



SEKRETARIAT KPU
PROVINSI
GORONTALO



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



LAPORAN KINERJA

TAHUN
2020

PENGANTAR KATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dapat dirampungkan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Provinsi Gorontalo disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja KPU provinsi Gorontalo adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan output selang tahun anggaran 2020, sehingga diharapkan kinerja KPU Provinsi Gorontalo dapat terukur dan terevaluasi keberhasilan maupun kekurangan baik secara kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan hingga manfaat yang dirasakan oleh publik.

Disadari bahwa, LKj KPU Provinsi Gorontalo masih memiliki kekurangan dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak, dengan komitmen untuk menjadi lebih baik di masa mendatang dalam mewujudkan visi KPU Provinsi Gorontalo, menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Gorontalo, Januari 2021

Plt .SEKRETARIS

ADRIAN UMAR MUSTAPA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai lembaga yang mengelola anggaran negara yang diamanatkan oleh undang-undang menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan, KPU Provinsi Gorontalo menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Gorontalo yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selang tahun 2020. Dalam LKj memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), 7 (Tujuh) sasaran strategis dan 8 (Delapan) indikator kinerja. Hal tersebut dievaluasi dan dianalisis capaian kinerja dapat dikatakan 100% kinerja dan 96% pencapaian realisasi anggaran. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Gorontalo kepada publik.

Keberhasilan pelaksanaan dalam mencapai target kinerja tahun 2020, KPU Provinsi Gorontalo dihadapkan pada situasi yang tidak mudah dimasa pandemi COVID 19. melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di 3 (tiga) Kabupaten diantaranya Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di 3 (Tiga) Kabupaten KPU Provinsi Gorontalo tetap melakukan supervisi dan monitoring dengan standar Prosedur COVID 19, sehingga proses pelaksanaan tahapan terus dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.

KPU Provinsi Gorontalo berkomitmen agar prestasi kinerja di lingkup KPU Provinsi Gorontalo dapat terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki, dengan harapan penyelenggaraan pemilihan di Gorontalo dapat semakin terpercaya.

tahapan Pilkada merupakan kerja keras kita semuanya sebagai penyelenggara Pilkada, Pemerintah daerah dan koordinasi stakeholder pemilu serta partisipasi masyarakat Gorontalo. Tentunya dalam proses pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi, dari faktor internal kelembagaan maupun luar lembaga KPU Provinsi Gorontalo. Akan tetapi dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki mampu diselesaikan dengan baik. Penguatan internal kelembagaan, bimtek dan evaluasi

senantiasa dilakukan sebagai langkah meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pilkada.

Disamping itu, upaya keras kinerja penyelenggara KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 terlihat dari keberhasilan pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2020, dengan mendapat penghargaan dari KPU RI atas gerakan dukungan rekaman KTP-EI terbaik pada pemilihan serentak tahun 2020. hal ini merupakan kesuksesan kita bersama yang harus kita pertahankan dan lebih baik lagi pada pelaksanaan Pilkada yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO 2020-2024.....	9
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	18
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	34
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	42
LAMPIRAN 2 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Gorontalo 2020	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahunan KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020	15
Tabel 2.3	Revisi Pagu Anggaran KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020	16
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020	18
Tabel 3.2	sasaran Program dan Indikator Kinerja Program KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020	20
Tabel 3.3	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat waktu	22
Tabel 3.4	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap KPU Provinsi Gorontalo dalam Pilkada Tahun 2020	23
Tabel 3.5	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang berlaku pada tahun 2016-2020.....	24
Tabel 3.6	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu pada tahun 2016-2020.....	26
Tabel 3.7	Rekap Jumlah PPS dan PPK Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten BoneBolango	27
Tabel 3.8	Presentase Kesesuaian Kompetensi pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap standar Kompetensi pada Tahun 2016-2020	28

Tabel 3.9	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik Tahun 2016-2020	29
Tabel 3.10	Persentase rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada Tahun 2016-2020	31
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016-2020	32
Tabel 3.12	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2016-2020.....	34
Tabel 3.13	Realisasi APBN Murni KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020	34
Tabel 3.14	Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Murni dan Hibah APBD Tahun Anggaran 2016-2020 KPU Provinsi Gorontalo	35
Tabel 3.15	Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran KPU Provinsi Gorontalo.....	36

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tahun 2020	5
Grafik 1.2	Data Golongan dan Kepangkatan KPU Provinsi Gorontalo	6
Grafik 1.3	Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2020	7
Grafik 1.4	Persentase Pegawai Tahun 2020.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum dan Pemilihan merupakan fondasi awal bagi demokrasi dalam memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD dan DPRD dalam perspektif ketatanegaraan. Dalam Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh komisi Pemilihan Umum, Untuk menjalankan pemilihan tersebut KPU bersifat tetap, mandiri dan independen, yang tentunya para anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan harus tunduk dan patuh pada prinsip dan aturan yang menjadi pedoman pemilu dan pemilihan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat pada dimensi kebebasan sipil, dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat, bahkan dengan keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi langsung diutarakan pada permasalahan sosial, politik dan ekonomi. Penyampaian aspirasi, kritikan terhadap kebijakan dan bahkan sampai poling pendapat dipandang lebih efektif dan efisien penyelesaian melalui media sosial, sehingga kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin maju.

Selain kebebasan sipil, perkembangan demokrasi pasca Reformasi tahun 1999, pada dimensi aparaturnya penegak hukum, supremasi hukum mulai memperlihatkan perbaikan. Tuntutan hak dan ketidak cermatan dalam Pemilu dan Pemilihan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, dimana putusan yang telah ditetapkan bersifat final mengikat, tidak ada ada putusan lain atau pengadilan lain dapat membatalkan atau merubahnya.

Sebagai negara yang besar Indonesia mampu menjalankan negara yang demokratis dengan pergantian penyelenggara negara melalui Pemilihan Umum. pilihan utama Pemilu merupakan cara konstitusi, aman dan tertib tertentu akan memberikan kebebasan dan hak yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam Pemilihan Umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Secara umum bahwa setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah aturan yang ada senantiasa berubah dipengaruhi oleh Undang-undang tentang pemilihan, sehingga hal tersebut dapat mengakomodir hal - hal yang berhubungan dengan dinamisnya perkembangan demokrasi secara nasional maupun lokal dan perbaikan sistem pemilihan. Dipihak lain, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Umum memberi warna tersendiri terhadap penguatan kelembagaan demokrasi baik dari dimensi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik.

Kedewasaan berpolitik membawa searah dengan kemajuan demokratisasi sebagai ciri masyarakat yang beradab, yang menghormati nilai-nilai kebebasan penghargaan terhadap perbedaan memberikan pendapat, kebebasan memberikan informasi dan menjamin hak hak konstitusi warga negara.

Pada ruang lain, salah satu tantangan dalam pemilu adalah maraknya praktek politik uang (*money politic*) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan Pemilihan Umum. Bahwa politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi, politik uang ini merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan votes (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas, yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu Pemilihan Umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala teknik.

Oleh sebab itu, melalui visi misi dan program KPU sampai tingkat bawah berupaya mewujudkan pemiliu yang berintegritas, yang bebas dari politik uang, kekerasan dan ketidakadilan melalui laporan kinerja ini KPU Provinsi Gorontalo

bersama KPU kabupaten/kota mempertanggung jawabkan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2020.

B.KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU Provinsi Gorontalo bersifat tetap, mandiri dan hirarki dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang serta berperan sebagai koordinator dan fasilitator bagi KPU Kabupaten / Kota diwilayah Gorontalo.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, diatur Tugas KPU Provinsi dalam pemilihan umum sebagaimana pasal 15 sebagai berikut:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota;
- d. menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;

- h. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dibentuk Sekretariat KPU secara berjenjang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 diatur secara jelas tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dalam pasal 87 ayat (1), (2), (3) sebagai berikut:

2. Tugas Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Memberi dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggara pemilu berdasarkan norma, standar prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- b. Memelihara arsip dan dokumen KPU Provinsi
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi

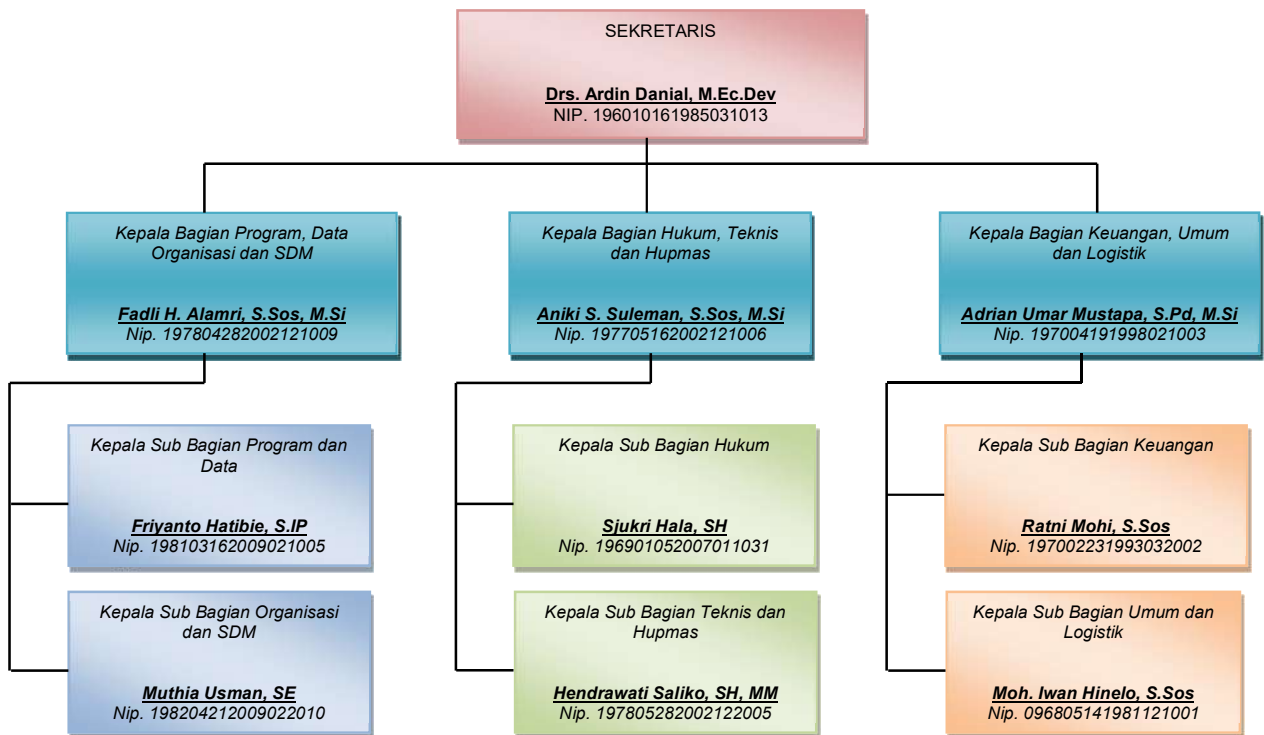
C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo sebagai berikut

:

**Grafik 1.1 STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2020**



2. Sumber Daya Manusia

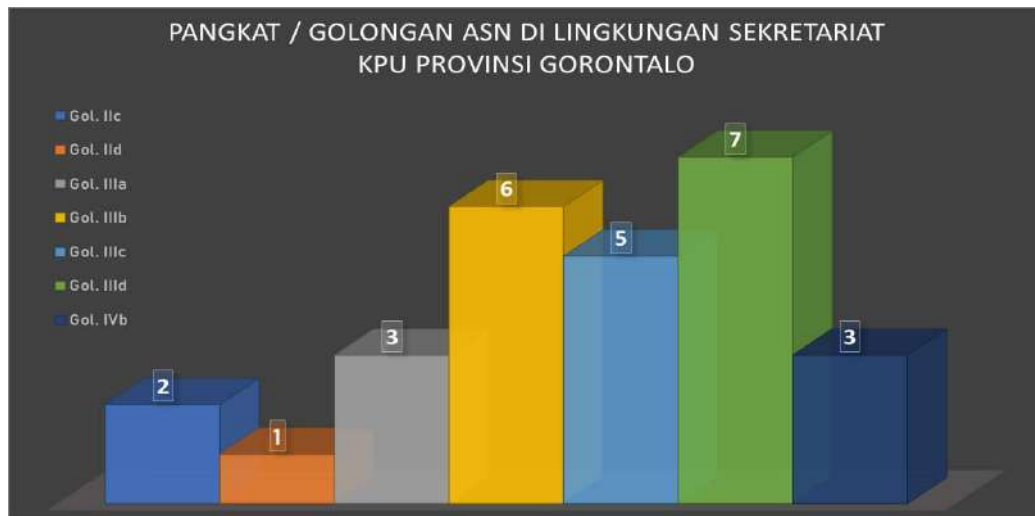
Penyelenggara Penyelenggara Pemilu selang tahun 2020 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengalami penurunan kuantitas (jumlah) dipengaruhi oleh pemetaan dan analisis jabatan masing masing Aparatur Sipil Negara yang bekerja di masing-

masing satuan kerja, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 05 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal pemetaan pegawai pada sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. surat tersebut menyamaratakan Aparatur sipil negara setiap Sekretariat KPU Provinsi maksimal berjumlah 35 orang dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 17 orang, sehingga masing masing ASN diharapkan mampu atau serba bisa dalam melaksanakan tugas ke pemilu dan kedinasan. Kendala yang di hadapi KPU Provinsi Gorontalo dalam sumberdaya manusia masi kurang atau tidak sesuai dengan surat edaran KPU RI, diakibatkan ada beberapa pegawai mengalami penarikan oleh instansi induk daerah, pensiun dan ada juga yang mengisi jabatan yang kurang di KPU Kabupaten/Kota sehingga jumlah pegawai KPU Provinsi Gorontalo berjumlah 28 orang yang seharusnya 35 orang untuk setiap Provinsi seluruh Indonesia

Disamping itu, khususnya pada jajaran kesekretariatan mengisi beberapa jabatan struktural yang dimutasikan atau mengalami pergeseran dari instansi induk (Pemerintah Daerah) dengan mempertimbangkan kemampuan aparatur negara yang disesuaikan dengan Peraturan yang ada.

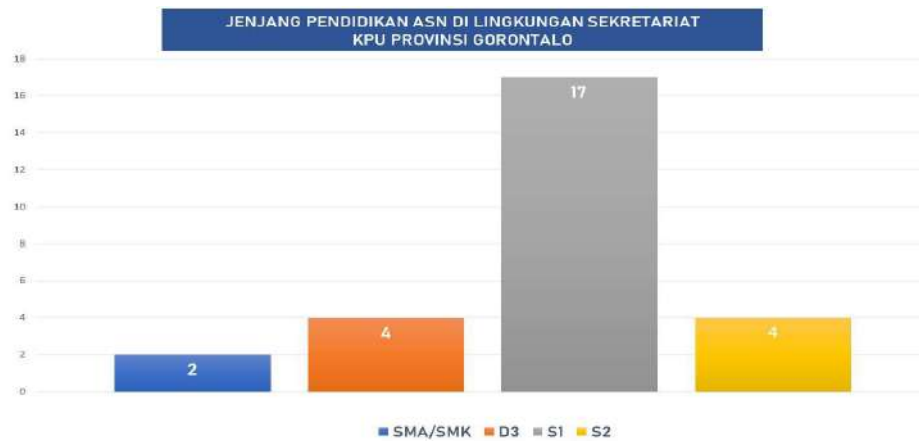
Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Grafik 1.2 Data Golongan dan Kepangakatan KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020



Komposisi aparatur sipil negara yang bekerja di Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo memiliki beragam disiplin ilmu dan jenjang pendidikan seperti grafik dibawah ini:

Grafik 1.3 Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2020



Jenis kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang ada di KPU Provinsi Gorontalo terdiri dari pegawai negeri sipil KPU yang diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI (pegawai organik) sebanyak 12 orang dan aparatur sipil negara yang berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diberi penugasan di Intansi KPU sebanyak 16 orang dengan total pegawai berjumlah 28 orang. Adapun persentase sebagaimana grafik dibawah ini

Grafik 1.4 Persentase Pegawai Tahun 2020



D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan laporan kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan laporan kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok pokok isi dari seluruh laporan kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tupoksi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian target dan visi misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO 2020 - 2024

KPU Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategi yang telah disusun oleh Komisi



Pemilihan Umum RI. Renstra KPU Provinsi Gorontalo memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 74.a/HK.03 - Kpts/Prov/VI/2018 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2020-2020.

Adapun visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2020-2025 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Adapun visi KPU Provinsi Gorontalo 2020-2025 adalah **Menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur.**

Penjabaran visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional nawa cita, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2020 – 2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabilitas, serta aksesibel
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu
- c. Menjalankan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

3. Tujuan KPU Provinsi Gorontalo

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo.

4. Indikator Kinerja Utama

Sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo sesuai Indikator Kinerja KPU RI sebagaimana dituangkan dalam keputusan KPU Nomor 74.a/HK.03-Kpts/Prov/VI/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun indikator kinerja utama sebagaimana berikut:

- 1) Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- 2) Persentase partisipasi pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan
- 3) Persentase partisipasi pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan
- 4) Persentase partisipasi pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan
- 5) Persentase pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
- 6) Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik
- 7) Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan
- 8) Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
- 9) Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo
- 10) Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

Untuk menjabarkan IKU KPU Provinsi Gorontalo dicapai melalui sasaran strategis berupa program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo

5. Sasaran Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai kurun waktu 2020-2024 adalah



meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan 2020, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks

integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP).

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang demokratis:
 - a. Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan;
 - e. Persentase pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;

2. Meningkatnya Pemilu / Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, dengan indikator:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo;
 - b. Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo.

B. RENCANA KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020

Setiap tahun anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo akan melaksanakan 3 (tiga) program dan 8 (Delapan) indikator kinerja program yang akan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020 mempunyai rencana kinerja tahunan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3	4
1	<u>Program Dukungan Manajemen dan</u>	Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3	4
	<u>Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</u>			
		Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi	90%
		Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik
			Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik
2	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</u>	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%
3.	<u>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</u>	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi	100%

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3	4
		Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	

C. PERJANJIAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020

Dalam rangka mengaktualisasikan rencana kerja tahunan telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja KPU Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahunan KPU Provinsi Gorontalo 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
4	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%
6	Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik
		Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik

PROGRAM

ANGGARAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Rp. 6.187.815.000,-

2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Rp. 590.608.000,-

Bahwa dalam perjanjian kinerja telah dilakukan perubahan karena penambahan anggaran sebagaimana dalam matriks dibawah ini :

Tabel 2.3 Revisi Pagu Anggaran KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN DIPA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	SELISIH (+/-)	KETERANGAN
1	DIPA AWAL	6.778.423.000	-	-	Pagu Awal DIPA APBN T.A 2020



NO	URAIAN DIPA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	SELISIH (+/-)	KETERANGAN
2	DIPA REVISI 1	6.778.423.000	5.923.486.000	854.937.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
3	DIPA REVISI 2	5.923.486.000	5.946.803.000	23.317.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
4	DIPA REVISI 3	5.946.803.000	6.450.350.000	503.547.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
5	DIPA REVISI 4	6.450.350.000	6.828.935.000	378.585.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
6	DIPA REVISI 5	6.828.935.000	7.197.879.000	368.944.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
7	DIPA REVISI 6	7.197.879.000	6.863.304.000	334.575.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan Pada tahun anggaran 2020 KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program dan kegiatan serta capaian kinerja dalam menyelenggarakan

Pemilihan Kepala Daerah yang terdapat pada tiga (3) kabupaten dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta kegiatan rutin dalam



menunjang tugas dan fungsi KPU Provinsi Gorontalo. Secara garis besar sasaran utama yang harus dicapai dapat digambarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). KPU Provinsi Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk kepada Sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024.

Adapun yang menjadi capaian indikator kinerja utama (IKU) KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100%
2	Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	77,50 %	84,60%	109%

3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	87,13 %	116%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	-	-
5	Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	84.60%	144%
6	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105%
7	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	0,14%	0.04%
8	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo	86%	100%	116%
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik
10	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik

Bahwa dalam mengukur target indikator kinerja utama (IKU) merujuk pada target rata-rata nasional yang akan dicapai oleh KPU sebagai kantor pusat, dimana Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga hirarki yang terstruktur dari Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Provinsi sebagai koordinator dan KPU Kabupaten/Kota bertindak sebagai pelaksana kegiatan langsung dilapangan dan dibantu oleh badan penyelenggara adhoc (PPK dan PPS). Selain itu melihat pada perbandingan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja pada tahun berjalan serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan ataupun penurunan kinerja dan alternative solusi yang dilakukan.

Tabel 3.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran Program 1. Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini				
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal				
2	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran Program 3. Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
3	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten				
4	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi	90%	90%	100%
Sasaran Program 5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo				
5	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%	49%	100%
Sasaran Program 6. Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan				
6	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran Program 7. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo				
7	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik
8	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik

Dari tabel diatas ini dapat dilihat bawah 7 (Tujuh) sasaran Program dan 8 (delapan) indikator kinerja Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo terealisasi dengan baik dan cukup memuaskan, karena melaksanakan kegiatan rutin APBN setiap tahunnya,

walaupun beberapa indikator kinerja revidi laporan keuangan dan nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU belum mencapai target.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja sekretariat KPU Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 dalam sasaran program dan indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

SASARAN	1
----------------	----------

TERWUJUDNYA DATA PEMILIH KPU PROVINSI GORONTALO YANG TERKINI

Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan strategis dalam setiap pemilu/pemilihan karena output yang dihasilkan adalah daftar pemilih yang menjamin hak warga negara masuk dalam daftar pemilih sesuai dengan syarat menjadi pemilih. Selain itu, digunakan sebagai bahan perencanaan penyusunan logistik pemilu/pemilihan untuk digunakan dalam pemungutan suara. Memilih merupakan hak politik warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, agar hak pilih warga negara tersebut benar-benar dapat digunakan pada saat pemilu/pemilihan. Proses pemutakhiran data merupakan pengadministrasian awal yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Undang-undang telah mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pengadministrasian pendaftaran pemilih dengan memperhatikan aspek akurasi, komprehensif dan mutakhir. Berdasarkan ketiga aspek tersebut diharapkan kualitas daftar pemilih dapat menjamin hak pilih setiap warga negara.

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya data pemilih yang terkini adalah mengukur persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo memutakhirkan data pemilih tepat waktu selang tahun 2020. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 17 huruf l disebutkan kewajiban KPU Provinsi melakukan pemutakhiran dan memelihara data secara berkelanjutan dengan memutakhirkan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu penentu keberhasilan setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan adalah keakuratan dan ketepatan daftar pemilih, makin berkualitas daftar pemilih maka dianggap penyelenggaraan pemilu semakin baik, karena daftar pemilih menentukan hak konstitusi warga negara untuk memilih di TPS.

Disamping itu, pembersihan data pemilih dalam arti setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih hanya terdaftar satu kali dalam daftar pemilih, sehingga tidak ditemukan pemilih ganda dalam daftar pemilih. apabila daftar pemilih masih ditemukan ganda yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

Selain bersihnya pemilih ganda yang menyebabkan daftar pemilih berkualitas, hal lainnya adalah pembersihan data pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, alih status TNI/POLRI dan pemilih dibawah umur, apabila indikator persyaratan pemilih ini dapat dibersihkan atau tertata dengan baik maka rumusan partisipasi pemilih semakin baik.

Pemutakhiran data pemilih pada Pilkada tahun 2020 untuk Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berjalan sesuai tahapan dan tidak melewati batas yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republic Indonesia (KPU Ri) sehingga capaian indikator pada sasaran ini sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100 persen cara perhitungan diukur dari ketepatan waktu sesuai peraturan PKPU dimana setiap KPU apabila melewati tanggal yang ditentukan pada setiap tahapan akan mendapatkan teguran atau sanksi dari KPU Ri. Adapun capaian dalam perjanjian kinerja yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo dari tahun 2020 sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.3 Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu pada tahun 2016 -2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019 (%)	2020		Capaian Realisasi (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100

Sedangkan kinerja dalam indikator capaian persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota dalam memutakhirkan data pemilih tepat waktu diukur dari KPU Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango yang melakukan Pilkada. diwujudkan dengan ketepatan waktu dalam melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih maupun kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga mencapai 100 persen realisasi fisik. Proses panjang dalam pemutakhiran data pemilih yang membutuhkan energi, keseriusan bahkan perhatian terhadap pengelolaan terhadap data pemilih.

Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang melakukan Pilkada di tahun 2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 3.4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap KPU Provinsi Gorontalo dalam Pilkada Tahun 2020

NO	KABUPATEN KOTA	KEC	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH		
					LK	PR	TOTAL
1	KAB. GORONTALO	19	205	811	141.126	142.722	283.848
2	KAB. BONE BOLANGO	18	165	351	57.453	58.140	115.593
3	KAB. POHUWATO	13	104	306	51.832	50.954	102.786
TOTAL		50	474	1.468	250.411	251.816	502.227

Setiap tahunnya KPU Provinsi Gorontalo melakukan pemutakhiran yang berkelanjutan, baik dalam proses tahapan pemilihan maupun tidak adanya pemilu/pemilihan. KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan melakukan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Se-Provinsi Gorontalo bersama unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota Divisi Perencanaan Data, unsur Dinas DKCS Kabupaten/Kota dan Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo, unsur partai politik dan jajaran lembaga pemasyarakatan yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo.

SASARAN 2

TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/ PEMILIHAN KPU PROVINSI GORONTALO SESUAI JADWAL

Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

Pemilihan Kepala Daerah mempunyai Tahapan yang cukup panjang yang dimulai dari awal tahun 2020 yang berakhir tahun 2021 dengan tiga tahapan utama mulai dari tahapan persiapan pemilu, pelaksanaan pemilu dan tahapan penyelesaian pemilu. Pada dasarnya setiap tahapan yang dilaksanakan berjalan dengan semestinya sesuai jadwal yang ditetapkan.

Adapun indikator sasaran ini adalah persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal tahapan. Indikator ini untuk mengukur ketepatan tahapan pemilu yang ditopang dengan kegiatan antara lain tahapan pemilihan. Supervisi dan monitoring pemilu dan pemilukada, publikasi Informasi pemilu, pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana,

Supervisi dan monitoring Pemilihan Kepala Daerah yang berada di tiga Kabupaten berjalan sesuai dengan tahapan dan tepat waktu sehingga tidak mempunyai kendala apapun dari setiap tahapan yang ada. persentase yang didapat dari setiap tahapan dinilai 100 persen, adapun tahapan Pemilu/Pemilihan dari tahun 2019 – 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019 (%)	2020		Capaian Realisasi (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahapan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dilakukan di tahun 2019 tidak ada satupun tahapan yang tertunda dan mengalami kendala/permasalahan dengan mencapai 100 persen. dan untuk pemilihan kepala daerah yang berada di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 tidak mengalami kendala dan permasalahan di setiap tahapan sehingga mendapat 100 persen

SASARAN 3

TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK KPU PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU /PEMILIHAN

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

Pengelolaan logistik pemilu adalah salah satu tahapan yang paling signifikan dan menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan suatu pemilihan, tanpa dukungan logistik pemilu tidak akan berjalan secara efektif efisien bahkan tidak akan terlaksana tepat waktu tahapan pemungutan suara pemilu/pemilihan. tahapan pengelolaan logistik pemilu diawali dengan perencanaan, pemetaan kebutuhan logistik yang menganalisis tempat pemungutan suara (kondisi geografis dan kondisi sosial masyarakat) karena logistik tersebut memuat antara lain surat suara, jenis formulir, dan perlengkapan KPPS lainnya.

Dalam penyusunan logistik Pemilihan Kepala Daerah KPU Provinsi Gorontalo selalu melakukan monitoring dan evaluasi di setiap tahapan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan dan pendistribusiannya. Di Provinsi Gorontalo proses pengadaan diatas 200 juta keatas dilaksanakan oleh UKPBJ KPU Provinsi Gorontalo sesuai dengan perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa berupa alat peraga kampanye serta alat pelindung diri (APD) Pemilu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020 dan untuk pengadaaan yang tercantum dalam e - catalog dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh masing - masing KPU Kabupaten penyelenggara berupa surat suara, formulir salinan, hologram, tinta, segel serta buku panduan PPK dan KPPS. Dalam pendistribusiannya Pemilu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020 logistik dilakukan

secara transparan dan melibatkan aparat keamanan serta PPK dan PPS di masing – masing wilayahnya.

Dengan usaha dan kerja keras KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten yang melakukan Pilkada semua kegiatan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikitpun terutama di bagian logistik sehingga indikator kinerja pada sasaran ini 100 persen. Adapun indikator kinerja pada pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan dari tahun 2020 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.6 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisa	Reali	Reali	Reali	2020		Capaian Realisasi (%)
		si 2016 (%)	sasi 2017 (%)	sasi 2018 (%)	sasi 2019 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa tercapai target dalam pengadaan logistik setiap pemilu/pemilihan pada tahun 2016 - 2020 KPU Provinsi Gorontalo sangat memperhatikan kualitas, jenis dan mutu yang sesuai standar nasional yang telah diatur oleh KPU RI dalam ketentuan peraturan KPU dan surat keputusan KPU RI. selain itu dalam hal pendistribusian juga dilakukan dengan perencanaan jadwal yang matang, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan jarak tempuh, lokasi yang rawan seperti berbukit, pegunungan dan kepulauan, sehingga pendistribusian logistik dapat dilakukan secara tepat waktu.

Keberhasilan pendistribusian logistik tepat waktu dan berkualitas pada Pilkada tahun 2020 dilakukan dengan berbagai kegiatan berupa kegiatan

rapat/rakor berkaitan dengan data kebutuhan anggaran logistik pemilu/pemilihan dan layanan pengadaan logistik

SASARAN

4

MENINGKATNYA KAPASITAS SDM KPU PROVINSI GORONTALO YANG BERKOMPOTEN

Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo Terhadap Standar Kompetensi

Pada tahun 2020 KPU Provinsi Gorontalo mengadakan seleksi calon pegawai negeri sipil yang diadakan oleh KPU RI dan untuk pelaksanaan kegiatannya diadakan di Provinsi Gorontalo bagi pelamar yang mendaftar di lokasi daerah Gorontalo. Dan untuk Provinsi Gorontalo ketambahan 5 cpns yang lulus dan ditempatkan pada KPU Provinsi dan sebagian di KPU Kabupaten, hal ini dapat menunjang kegiatan kedepannya. KPU Provinsi Gorontalo juga melakukan monitoring di Kabupaten/Kota bagi penyelenggara adhoc yang akan melaksanakan tugasnya di Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Gorontalo, kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yang telah mengikuti bimbingan teknis oleh KPU Kabupaten terhadap apa yang menjadi tugasnya berkaitan dengan teknis kepemiluan, sehingga dalam pelaksanaan tahapan diharapkan menjadi penyelenggara adhoc yang profesional dan terampil dibidangnya.

Adapun jumlah PPK, PPS yang direkrut pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Rekap Jumlah PPK dan PPS Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango

NO	KAB/KOTA	KPU	PPK			PPS			PPDP	KPPS	
			KECAMATAN	JUMLAH PPK	SEK.PPK	KELURAHAN/DESA	JUMLAH PPS	SEK.PPS		TPS	JUMLAH KPPS
1	KAB. BONE BOLANGO	5	18	90	54	165	495	330	350	351	2.457
2	KAB. GORONTALO	5	19	95	57	205	615	205	811	811	5.677
3	KAB. POHUWATO	5	13	65	39	104	312	208	296	306	2.142
TOTAL		15	32	160	96	309	927	413	1107	1.468	10.276

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi, adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.8 persentase kesesuaian kompetensi pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap standar kompetensi pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019 (%)	2020		Capaian Realisasi (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap standar kompetensi	90	90	90	90	90	90	100

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa persentase realisasi tercapai 90 persen dari yang ditargetkan, sehingga persentase capaian realisasi mencapai 100 persen. dalam hal pemetaan kompetensi pegawai pada tahun 2020, dimana untuk mengukur data base kepegawaian setiap bulannya KPU Kabupaten/Kota melaporkan ke KPU Provinsi Gorontalo nominatif kepegawaian, yang mana perubahan perkembangan data base kepegawaian tersebut disampaikan ke KPU RI. selain pengelolaan data base kepegawaian peningkatan bidang SDM menjalankan penilaian kinerja SDM melalui rapat tim penilaian.

KPU Provinsi Gorontalo melakukan penataan organisasi berupa penyeragaman ASN yang bekerja di Sekretariat KPU dengan komposisi 35 ASN untuk Satker Provinsi dan 17 untuk satker Kabupaten/Kota. Pembinaan SDM senantiasa dilakukan guna meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dilingkungan KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga aparatur sipil negara yang bekerja di KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota, menjadi aparatur yang handal dan siap melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional, sedangkan kegiatan pelaksanaan dokumen kepegawaian melakukan berupa updating setiap bulan daftar nominatif kepegawaian dan kenaikan pangkat 2 periode setiap tahun.

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini antara lain penataan organisasi, pemninaan dan pengelolaan SDM, layanan pengadaan pegawai baru, dokumen kepegawaian, dokumen perencanaan anggaran.

SASARAN 5

TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU PROVINSI GORONTALO

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik

Sasaran Program terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Gorontalo, dilakukan berupa belanja modal sarana dan prasarana sedalam menunjang terlaksananya seluruh tugas maupun tahapan pemilu dan pemilihan, pengadaan sarana dan prasarana, tentunya mengacu pada kaidah dan norma standar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sasaran ini diwujudkan dengan Indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan baik. Adapun kegiatan yang dilakukan pada indikator ini antara lain layanan sarana dan prasarana internal, pengelolaan hibah pemilihan .persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai KPU Provinsi Gorontalo dari tahun 2019 - 2020 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan baik pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019 (%)	2020		Capaian Realisasi (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan baik	50	50	50	50	49	49	100

Capaian indikator kinerja terlihat dari tahun 2019 hingga tahun 2020 tercapai persentase realisasi fisik sebesar 100 persen, hal ini dilakukan dengan pengadaan barang yang ada di KPU Provinsi Gorontalo yang nantinya akan menjadi aset dan alat penunjang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), untuk tahun 2020 pengadaan barang dan jasa di KPU Provinsi Gorontalo melakukan perbaikan dan penambahan bangunan, sesuai dengan permintaan dan anggaran yang ada sehingga aktifitas dan kerja para pegawai dilingkungan KPU Provinsi Gorontalo dapat terlaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya sehingga bagi masyarakat merasa terfasilitasi dan apa yang dibutuhkan berupa informasi terkait dengan Kepemiluan dapat terlayani dan terlaksana dengan baik oleh PPID KPU Provinsi Gorontalo.

SASARAN

6

TERWUJUDNYA KEPUTUSAN KPU PROVINSI GORONTALO SERTA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI HUKUM, SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang berada di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 Provinsi Gorontalo menyusun rancangan juknis dari setiap tahapan pemilihan yang merujuk pada peraturan KPU RI yang berkaitan dengan tahapan pemilihan sebagai pedoman pelaksana teknis yang menjabarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum setiap tahapan. Tujuan dibuat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan teknis Pemilu/Pemilihan kepada pelaksana penyelenggara pemilu/pemilihan dari tingkat KPU Provinsi sampai dengan tingkat KPPS.

Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU. Untuk pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.10 Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019 (%)	2020		Capaian Realisasi (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100	100	100	100	100	100	100

Keberhasilan indikator ini dilihat dari ketepatan waktu dan materi juknis sesuai kerangka penyusunan regulasi KPU sehingga dikatakan mencapai 100 persen yang diimplementasikan dengan output kegiatan advokasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum berupa menyusun daftar inventaris masalah berkaitan dengan sengketa pencalonan sebagai bahan dalam persiapan menghadapi kasus hukum baik dibawaslu dan PTTUN.

Selain itu, KPU Provinsi Gorontalo menyusun juknis sebagai pedoman penyelenggaraan tahapan pemilihan yang selanjutnya dilakukan penyuluhan maupun sosialisasi kepada peserta pemilihan agar memahami mekanisme pelaksanaan serta dapat mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan yang menopang indikator ini antara lain rancangan peraturan perundang – undangan, layanan administrasi kepegiluan, dokumentasi dan informasi produk hukum dan sosialisasi pilkada serentak 2020

SASARAN 7

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO

Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang secara langsung mengelola Pemilu/Pemilihan dalam dukungannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam penggunaan anggaran negara setiap kementerian dan lembaga negara berkewajiban dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan kinerja suatu lembaga. Oleh karena itu pada tahun 2020, KPU Provinsi Gorontalo menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sebagai akuntabilitas kepada publik.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU dengan tolak ukur indikator kinerja berupa :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 hanya mengelola kegiatan rutin diantaranya laporan pelaksanaan kegiatan, layanan perkantoran dan pengelolaan barang milik negara Pelaksanaan kinerja dan anggaran telah terukur melalui sasaran strategis dan Indikator kinerja yang telah ditargetkan setiap tahunnya dalam rencana strategis Komisi Pemilihan Umum dan dalam setiap tahunnya termuat dalam rencana kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi target kinerja dan anggaran dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan secara eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Untuk KPU secara eksternal di evaluasi dan diberi nilai oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan target B. sedangkan untuk KPU Provinsi Gorontalo dievaluasi oleh inspektorat KPU RI dan untuk KPU Kabupaten/Kota dievaluasi oleh KPU Provinsi Gorontalo.

Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi 2019 (%)	2020		Capaian Realisasi (%)
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)		Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kpu Provinsi Gorontalo	-	-	Cukup Plus	Baik	Baik	Baik	Baik

Dari tabel diatas terlihat bahwa KPU Provinsi Gorontalo untuk tahun 2020 belum dilakukan evaluasi secara berjenjang maupun lembaga pemerintah berwenang dikarenakan pandemi covid 19 sehingga dalam hal penilaian akuntabilitas kinerja melalui laporan kinerja Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo belum dapat dicapai, namun hal ini tidak menjadi kendala untuk menyampaikan laporan setiap tahunnya sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah / lembaga, KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota setiap tahunnya menyusun laporan kinerja dan perjanjian kinerja.

2. Reviu Laporan Keuangan

Sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang transparan serta akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. KPU Provinsi Gorontalo dan jajaran penyelenggara pemilu setiap tahun berusaha untuk dapat merealisasikan anggaran sebesar minimal 95 % dalam target nasional dan realisasi fisik sebesar 100 persen dengan target secara nasional opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh karena itu dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Gorontalo, dilakukan reviu atas laporan keuangan yang dilaporkan melalui rekonsiliasi ke Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan simak BMN ke KPKNL Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang mendukung sasara ini adalah layanan pembinaan perbendaharaan KPU, laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu, layanan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, layanan perkantoran, laporan persediaan stock opname dan laporan hasil reviu laporan keuangan.

Adapun perbandingan capaian pengukuran indikator kinerja dari reviu laporan keuangan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.12 Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019 (%)	2020		Capaian Realisasi (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Cukup	Baik	Cukup Plus	Baik	Baik	Baik	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa KPU Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2020 dapat mencapai target. hal ini dilihat dari tidak ada catatan rekomendasi perbaikan laporan keuangan hasil review laporan keuangan dari inspektorat KPU RI.

C.AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Pada tahun 2020 KPU Provinsi Gorontalo mengelola anggaran APBN yang diberikan dari KPU RI. Adapun anggaran APBN sebesar Rp. **6.863.304.000,-** (Enam milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah) dari anggaran tersebut KPU Provinsi Gorontalo mengembalikan dana sebesar Rp. **271.044.944,-** (Dua ratus tujuh puluh satu juta empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)

Realisasi dari anggaran dalam DIPA KPU Provinsi Gorontalo Nomor: SP. DIPA-076.01.2.654556/2020 Tanggal 05 Desember 2019 untuk anggaran APBN murni mencapai 96 % sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.13 Realisasi APBN Murni KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA SATKER	PAGU		REALISASI	SISA PAGU	PERSEN TASE (%)	KET
		AWAL	REVISI				
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(5/4*100)	8
1	KPU PROVINSI GORONTALO	6.778.423.000	6.863.304.000	6.592.259.056	271.044.944	96	APBN MURNI tahun 2020

Pengelolaan anggaran Tahun 2020 sampai dengan tahun anggaran 2020 Alokasi Anggaran yang diberikan oleh KPU RI melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat dilihat sebagaimana tabel perbandingan dibawah ini

**Tabel 3.14 Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Murni da HIBAH APBD
Tahun Anggaran 2016 - 2020 KPU Provinsi Gorontalo**

NO	TAHUN ANGGARAN	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%
1	2016	APBN MURNI	Rp 6.403.263.000	Rp 5.995.675.910	93,63
		APBN + HIBAH APBD	Rp 56.335.708.000	Rp 43.156.085.894	76,61
2	2017	APBN MURNI	Rp 7.098.808.000	Rp 6.822.519.807	96,11
		APBN + HIBAH APBD	Rp 42.573.933.000	Rp 42.297.644.061	99,35
3	2018	APBN MURNI	Rp 17.489.352.000	Rp 16.523.435.210	94,47
4	2019	APBN MURNI	Rp 24.459.262.000	Rp 21.192.876.997	86,65
5	2020	APBN MURNI	Rp 6.863.304.000	Rp 6.592.259.056	96

Upaya pencapaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo merupakan bentuk kesungguhan dalam mengaktualisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang bersinergi dengan KPU kabupaten/kota, badan adhoc penyelenggara Pemilu (PPK, PPS) serta didukung oleh stake holder Pemilu (Partai Politik, Pasangan Calon, Pers, LSM, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat), Adapun akuntabilitas keuangan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran KPU Provinsi Gorontalo

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 1. Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini							
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	130,122,000	130,120,900	99.99
SASARAN 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal							
2	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	728,934,000	580,572,927	79.65
SASARAN 3 Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan							
3	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100,346,000	99,460,585	99.12
SASARAN 4. Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten							
4	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi	90%	90%	100%	291,007,000	290,491,425	99.82
SASARAN 5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo							
5	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%	49%	100%	515,837,000	484,763,000	93.98

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 6. Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan							
6	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	191,105,000	189,243,579	99.03
SASARAN 7. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo							
7	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik	1,021,528,000	1,020,206,159	99.87
	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik	3,884,425,000	3,797,400,481	97.76
JUMLAH TOTAL					6,863,304,000	6,592,259,056	96

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan dan output diatas rata-rata target anggaran, sedangkan untuk target fisik setiap output kegiatan mencapai 100 persen. Untuk output belanja pegawai masih terdapat sisa anggaran yang tidak dapat digunakan, karena disesuaikan dengan keberadaan aparatur sipil negara dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan yang bersifat fluktuatif disesuaikan dengan kehadiran pegawai.

Dalam pencapaian sasaran program KPU Provinsi Gorontalo telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu, dapat terlaksana sesuai dengan target 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar 99,99 persen pada tahun 2020, KPU Provinsi melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap tahunnya
2. Persentase KPU/KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal. Pelaksanaan pembentukan badan penyelenggara adhoc pada Kabupaten yang melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, dan melakukan supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu indikator ini tercapai target kinerjanya 100 persen dengan realisasi keuangan sebesar 79.65 persen.

3. Persentase yang mendistribusikan logistik pemilu/ pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Indikator kinerja ini tercapai 100 persen dari yang ditargetkan 100 persen dengan persentase realisasi keuangan 99.12. Hal ini dicapai dengan melakukan monitoring ke KPU Kabupaten yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 .
4. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi. Indikator kinerja ini berhasil mencapai target sebesar 90 persen, dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99.82 persen. capaian ini dimaksimalkan dengan beberapa kegiatan yaitu penataan, pembinaan dan pengelolaan SDM serta ketatalaksanaan SDM.
5. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Capaian indikator ini dilakukan dengan pemenuhan sarana penunjang pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID), sehingga tercapai realisasi fisiknya sebesar 49 Persen sebagaimana target yang telah ditetapkan dan persentase realisasi keuangan sebesar 93.98 persen.
6. Persentase rancangan peraturan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU. KPU Provinsi Gorontalo telah menyusun beberapa petunjuk teknis sebagai turunan dari peraturan KPU RI yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tahapan pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo, sehingga capaian indikator kinerja mencapai 100 persen sesuai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99.03 persen
7. Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU. Pencapaian indikator kinerja ini dengan melakukan kegiatan rutin maupun melakukan monitoring di KPU Kabupaten/Kota setiap triwulan. seluruh rangkaian kegiatan untuk tahun anggaran 2020 persentase realisasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar 99.87 persen
8. Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo sebagai lembaga negara berkewajiban melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, KPU Provinsi Gorontalo telah dilakukan reviu atas laporan keuangan yang dilaporkan melalui rekonsiliasi ke Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan simak BMN ke KPKNL Provinsi Gorontalo. Hasil Reviu laporan keuangan tidak adanya catatan rekomendasi dari

Inspektorat KPU RI, oleh karena itu Indikator kinerja telah mencapai target baik dengan capaian persentase realisasi anggaran sebesar 97.76 persen.

BAB IV

PENUTUP

Setiap kementerian/lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang mengharuskan membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban setiap tahunnya, yang sudah barang tentu mengacu pada perjanjian kinerja setiap instansi pada tahun berjalan. Pertanggungjawaban ini, mengarah pada rencana strategi masing-masing lembaga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat keberhasilan yang diukur dari target capaian yang telah ditetapkan, selain itu melakukan perbandingan setiap tahunnya.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terurai secara sistimatis dalam laporan kinerja yang memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang akan dicapai selang tahun anggaran 2020. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja telah digambarkan dalam realisasi anggaran dan fisik yang telah ditetapkan dalam target perjanjian kinerja Tahun 2020 yang realisasinya dalam program dan kegiatan KPU Provinsi Gorontalo dalam rangka mencapai visi dan misi.

Untuk capaian visi dan misi telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dalam mendorong capaian dan sekaligus sebagai bahan pengukur keberhasilan yang telah dicapai sesuai target dalam satu tahun anggaran. Selain capaian selang tahun 2020, KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berada di tiga Kabupaten yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango tanpa ada kendala yang cukup signifikan, tentunya hal ini dibarengi dengan semangat dan kerja keras sehingga membuahkan hasil yang dibuktikan dengan penghargaan yang diraih pada pelaksanaan pemilu/pemilihan selang tahun 2015-2020 antara lain :

1. Keberhasilan dalam partisipasi memilih pada Pilkada serentak Tahun 2015 sebesar 80,01 % diatas rata-rata nasional.
2. Pada tahun 2017 mendapat penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Pilkada 2017 terbaik.

3. Dalam hal pembinaan apartur penyelenggara pemilu mendapat terbaik satu kategori tertib administrasi dalam pelaporan penegakan disiplin dan pembinaan SDM
4. Pada tahun 2019 penghargaan dari KPU RI Terbaik I (satu) kategori Kreatifitas Iklan dan Sosialisasi Pemilu 2019, terbaik I (satu) Tertib Administrasi Dalam Pelaporan, Penegakan Disiplin dan Pembinaan SDM, Terbaik II (dua) Ide Kreatif Digitalisasi data Hasil Pemilu 2019, Terbaik II (dua) Upload Data Hasil Pemilu 2019 dan mendapat piagam penghargaan dari Bupati Gorontalo sebagai lembaga/kementerian/OPD partipastif dalam mempromosikan senam goyang Mopobibi di Provinsi Gorontalo
5. Pada tahun 2020 KPU Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan gerakan dukung rekaman KTP – El terbaik pada pemilihan serentak tahun 2020

Penguatan sumber daya manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh upaya konsolidasi organisasi, koordinasi dan konsultasi. sehingga dapat mewujudkan profesionalitas dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%
6	Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik
		Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik

PROGRAM

ANGGARAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Lainnya

Rp. . 6.187.815.000,-

Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik

Rp 590.608.000,-

LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran Program 1. Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini				
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal				
2	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran Program 3. Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
3	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten				
4	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi	90%	90%	100%
Sasaran Program 5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo				
5	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%	49%	100%
Sasaran Program 6. Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan				



6	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran Program 7. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo				
7	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik
8	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik



RENCANA AKSI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA (PK) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE ANGGARAN	KEGIATAN / OUTPUT	PAGU ANGGARAN	RENCANA JADWAL KEGIATAN *)
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih	100%	3.357.010	Dokumen Pemutakhiran data pemilih	130.122.000	Rp 130.120.900
						130.122.000	Rp 130.120.900
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	3364	Tahapan Pemilihan	362.042.000	Rp 215.473.812
				3363	supervisi dan monitoring pemilu dan pemelukada	227.081.000	Rp 226.300.115
				3364,004	Pengelolaan PAW anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota	29.704.000	Rp 29.111.700
				3364.007	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	108.000.000	Rp 107.580.500
				3364.051	Publikasi Informasi Pemilu	2.107.000	Rp 2.106.800
						728.934.000	Rp 580.572.927
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Perentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	3356.008	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan[Base Line]	10.402.000	Rp 10.339.750
				3356,009	Layanan pengadaan Logistik	89.944.000	Rp 89.120.835
						100.346.000	Rp 99.460.585
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%	3358.001	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM.	67.665.000	Rp 67.559.100
				3358,004	Layanan pengadaan pegawai baru	35.929.000	Rp 35.868.000
				3358.006	Dokumen Kepegawaian	6.356.000	Rp 6.356.000
				3357,001	Dokumen Perencanaan Anggaran	181.057.000	Rp 180.708.325
						291.007.000	Rp 290.491.425
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	49%	3361	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	472.047.000	Rp 442.721.800
				3.355	Pengelolaan hibah pemilihan	43.790.000	Rp 42.041.200
						515.837.000	Rp 484.763.000
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	3363.002	Rancangan peraturan perundang - undangan	24.702.000	Rp 24.674.000
				3363	Layanan administrasi kepemiluan	75.669.000	Rp 74.112.149
				3363,012	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	22.600.000	Rp 22.594.175
				3363	Sosialisasi Pilkada serentak 2020	68.134.000	Rp 67.863.255
						191.105.000	Rp 189.243.579
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Baik	3357.004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	174.510.000	Rp 174.086.960
				3.360.994	Layanan Perkantoran	838.818.000	Rp 837.930.699
				3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	8.200.000	Rp 8.188.500
						1.021.528.000	Rp 1.020.206.159
		Reviu Laporan Keuangan	Baik	3355.002	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU.	17.993.000	Rp 17.942.700
				3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	70.400.000	Rp 69.197.100
				3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	39.514.000	Rp 39.079.900
				3355.994	Layanan Perkantoran	3.740.097.000	Rp 3.655.217.181
				3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16.421.000	Rp 15.963.600
						3.884.425.000	Rp 3.797.400.481
JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN TAHUN 2020						6.863.304.000	6.592.259.056